

## **Implementasi Kebijakan Penerimaan Prajurit TNI AD Jalur Afirmasi bagi Orang Asli Papua di Kodam XVIII/Kasuari**

**Nasution Ramdhani<sup>1</sup> Kusuma<sup>2</sup> Herlina Juni Risma Saragih<sup>3</sup>**

Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [nasutionramdhani51332@gmail.com](mailto:nasutionramdhani51332@gmail.com)<sup>1</sup> [kusumaunhan@gmail.com](mailto:kusumaunhan@gmail.com)<sup>2</sup>  
[herlina.saragih@idu.ac.id](mailto:herlina.saragih@idu.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Konflik yang terjadi di Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga dipengaruhi oleh persoalan sosial, politik, dan persepsi marginalisasi yang berdampak pada hubungan antara masyarakat dan negara. Dalam upaya memperkuat stabilitas wilayah, pemerintah melalui Kodam XVIII/Kasuari melaksanakan kebijakan penerimaan Prajurit TNI AD Calon Bintara Otonomi Khusus Orang Asli Papua (Caba Otsus OAP) Jalur Afirmasi sebagai bentuk peningkatan partisipasi masyarakat Papua dalam institusi pertahanan negara. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, serta mengkaji kontribusinya terhadap stabilitas keamanan dan integrasi nasional di Papua. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan desain studi kasus. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi kebijakan dalam konteks sosial dan kelembagaan yang kompleks. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan kerangka teori implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan afirmatif berjalan relatif efektif dan didukung oleh komunikasi yang baik, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang jelas. Faktor pendukung utama meliputi komitmen organisasi, dukungan pemerintah daerah, dan penerimaan masyarakat, sedangkan kendala utama berasal dari kondisi geografis Papua dan kompleksitas koordinasi lintas lembaga. Kebijakan ini berkontribusi terhadap peningkatan representasi Orang Asli Papua dalam institusi negara, penguatan hubungan antara masyarakat dan TNI AD, serta pembangunan kepercayaan yang mendukung stabilitas keamanan dan integrasi nasional. Penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan rekrutmen afirmatif merupakan instrumen pertahanan yang bersifat inklusif dan strategis dalam mendukung stabilitas wilayah di Papua. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang program afirmatif terhadap dinamika keamanan dan integrasi sosial di berbagai wilayah Papua.

**Kata Kunci:** Kebijakan Afirmatif, Orang Asli Papua, Implementasi Kebijakan, Stabilitas Keamanan, Integrasi Nasional



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Pertahanan negara merupakan instrumen fundamental dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pertahanan negara tidak hanya berorientasi pada penggunaan kekuatan militer, tetapi juga mencakup upaya menjaga stabilitas politik, sosial, dan keamanan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sejalan dengan perkembangan paradigma keamanan modern, ancaman terhadap negara tidak lagi dipahami semata-mata sebagai ancaman militer, tetapi juga mencakup konflik sosial, ketimpangan pembangunan, serta persoalan identitas yang berpotensi mengganggu integrasi nasional. Salah satu tantangan strategis pertahanan negara yang masih dihadapi Indonesia adalah konflik di Papua. Wilayah Papua memiliki posisi geostrategis yang penting

karena berbatasan langsung dengan Papua Nugini serta menjadi bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun demikian, konflik yang berlangsung sejak integrasi Papua ke Indonesia pada tahun 1969 menunjukkan bahwa persoalan keamanan di wilayah tersebut tidak hanya berkaitan dengan aktivitas kelompok bersenjata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor historis, politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Berbagai studi menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan, persoalan representasi politik, serta isu identitas lokal turut menjadi faktor yang memengaruhi dinamika konflik di Papua.

Dalam beberapa tahun terakhir, eskalasi konflik di Papua mengalami peningkatan, terutama pasca peristiwa Nduga pada tahun 2018. Berbagai laporan mencatat terjadinya insiden kekerasan yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok bersenjata yang berdampak pada korban jiwa, pengungsian masyarakat, serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya mampu menciptakan stabilitas jangka panjang. Meskipun penggunaan kekuatan keamanan diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara, pendekatan yang hanya berfokus pada aspek militer memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan akar permasalahan konflik yang bersifat multidimensional. Perkembangan konsep keamanan kontemporer menekankan pentingnya integrasi antara pendekatan keamanan (*hard power*) dan pendekatan non-militer (*soft power*). Dalam konteks Papua, salah satu kebijakan yang mencerminkan pendekatan tersebut adalah kebijakan afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP) melalui program rekrutmen Calon Bintara Otonomi Khusus (Caba Otsus) TNI Angkatan Darat. Kebijakan ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua yang memberikan ruang prioritas bagi OAP untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor strategis, termasuk bidang pertahanan dan keamanan. Melalui kebijakan ini, negara tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan personel pertahanan, tetapi juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat Papua dalam institusi negara.

Program rekrutmen 1000 Calon Bintara Otsus OAP yang dilaksanakan oleh Kodam XVIII/Kasuari menjadi salah satu bentuk konkret implementasi kebijakan afirmasi tersebut. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterwakilan OAP dalam tubuh TNI AD sekaligus memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat lokal. Melalui penempatan prajurit OAP sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di wilayah asalnya, diharapkan terbangun komunikasi yang lebih efektif, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap negara, serta penguatan stabilitas keamanan berbasis pendekatan teritorial dan sosial budaya. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan afirmasi tersebut dalam mendukung penyelesaian konflik Papua masih memerlukan kajian yang mendalam. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas konflik Papua dari perspektif keamanan, politik, maupun pembangunan secara terpisah. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan rekrutmen afirmatif OAP dalam perspektif pertahanan negara masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain normatifnya, tetapi juga oleh proses implementasi, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta dampak yang dihasilkan terhadap stabilitas wilayah dan integrasi nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai bagaimana implementasi kebijakan penerimaan Prajurit TNI AD Calon Bintara Otonomi Khusus Orang Asli Papua jalur afirmasi dilaksanakan oleh Kodam XVIII/Kasuari, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, serta kontribusinya terhadap stabilitas keamanan dan integrasi nasional. Kajian ini menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman mengenai efektivitas pendekatan humanistik dalam kebijakan pertahanan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan strategi pertahanan yang lebih adaptif terhadap kompleksitas konflik Papua. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

implementasi kebijakan penerimaan Prajurit TNI AD Caba Otsus OAP jalur afirmasi oleh Kodam XVIII/Kasuari, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya, serta menganalisis kontribusi kebijakan tersebut terhadap penguatan stabilitas wilayah dan integrasi nasional dalam perspektif pertahanan negara.

### Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Ringkasan Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Widjojo <i>et al.</i> (2009)	Akar konflik Papua	Konflik Papua disebabkan oleh sejarah integrasi, pelanggaran HAM, marginalisasi OAP, dan kegagalan pembangunan sehingga bersifat multidimensional	Membahas konflik Papua dan faktor penyebabnya	Penelitian tesis mengkaji implementasi kebijakan afirmasi rekrutmen TNI AD sebagai solusi konflik, sedangkan penelitian ini hanya mengidentifikasi akar konflik
Chauvel & Bhakti (2004)	Nasionalisme dan identitas politik Papua	Identitas dan representasi politik masyarakat Papua menjadi faktor penting dalam menjaga integrasi nasional	Membahas integrasi nasional di Papua	Penelitian tesis berfokus pada kebijakan afirmasi dalam institusi pertahanan, bukan aspek identitas politik semata
International Crisis Group (2012)	Pendekatan keamanan dalam konflik Papua	Pendekatan keamanan yang dominan belum efektif sehingga diperlukan dialog politik dan pembangunan ekonomi	Membahas penanganan konflik Papua	Penelitian tesis mengkaji implementasi kebijakan afirmatif rekrutmen OAP dalam TNI AD sebagai instrumen penyelesaian konflik
Suryawan (2018)	Strategi keamanan negara di Papua	Strategi militeristik memiliki keterbatasan apabila tidak disertai pembangunan sosial dan penguatan legitimasi negara	Membahas keamanan dan stabilitas Papua	Penelitian tesis fokus pada implementasi kebijakan rekrutmen afirmatif sebagai bagian dari strategi pertahanan negara
Bertrand (2004)	Konflik etnopolitik di Asia Tenggara	Konflik muncul ketika negara gagal mengelola keberagaman identitas secara inklusif	Menggunakan perspektif konflik dan integrasi sosial	Penelitian tesis secara spesifik menelaah konflik Papua dan kebijakan afirmasi di lingkungan TNI AD
Sugandi (2008)	Implementasi Otonomi Khusus Papua	Otonomi Khusus belum efektif mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua	Membahas kebijakan pemerintah terhadap masyarakat Papua	Penelitian tesis mengkaji kebijakan afirmasi pada sektor pertahanan melalui rekrutmen prajurit OAP
Widjojo (2010)	Dampak Otsus terhadap integrasi nasional	Peningkatan anggaran Otsus belum mampu memperkuat integrasi nasional akibat lemahnya tata kelola	Membahas integrasi nasional di Papua	Penelitian tesis menitikberatkan pada implementasi afirmasi rekrutmen TNI AD sebagai instrumen integrasi nasional
McGibbon (2004)	Tantangan Otsus dan kepercayaan publik	Pelaksanaan Otsus menghadapi persoalan kepercayaan publik dan inkonsistensi hubungan pusat-daerah	Membahas hubungan negara dan masyarakat Papua	Penelitian tesis menganalisis penguatan kepercayaan masyarakat melalui keterlibatan OAP dalam institusi TNI AD
Nugroho (2014)	Implementasi kebijakan publik di Indonesia	Kegagalan implementasi kebijakan sering disebabkan lemahnya koordinasi dan kapasitas kelembagaan	Menggunakan perspektif implementasi kebijakan	Penelitian tesis mengaplikasikan teori implementasi kebijakan secara spesifik pada kebijakan afirmasi rekrutmen Caba Otsus OAP Kodam XVIII/Kasuari
Suharto (2016)	Kebijakan afirmasi di sektor sosial Indonesia	Kebijakan afirmasi mampu meningkatkan representasi kelompok minoritas apabila diimplementasikan secara konsisten	Membahas konsep dan implementasi kebijakan afirmasi	Penelitian tesis mengkaji afirmasi dalam sektor pertahanan dan keamanan negara melalui penerimaan prajurit TNI AD OAP

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan rekrutmen Calon Bintara Otonomi Khusus (Caba Otsus) Orang Asli Papua (OAP) jalur afirmasi oleh Kodam XVIII/Kasuari dalam perspektif pertahanan negara. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan proses implementasi kebijakan, dinamika sosial, serta persepsi para aktor yang terlibat secara kontekstual dan komprehensif (Creswell, 2014). Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal (*single case study*) yang berfokus pada implementasi kebijakan rekrutmen afirmatif OAP di Papua Barat. Desain ini dipilih karena kebijakan tersebut merupakan fenomena yang spesifik dan memiliki keterkaitan erat dengan konteks konflik Papua, Otonomi Khusus, serta upaya penguatan stabilitas wilayah dan integrasi nasional (Yin, 2018). Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang menitikberatkan pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pelaksana kebijakan, prajurit OAP, serta pihak-pihak terkait yang memiliki keterlibatan dalam program rekrutmen afirmatif. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Penerimaan Prajurit TNI AD Caba Otsus OAP Jalur Afirmasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerimaan Prajurit TNI AD Calon Bintara Otonomi Khusus Orang Asli Papua (Caba Otsus OAP) Jalur Afirmasi di Kodam XVIII/Kasuari telah berjalan sesuai tujuan kebijakan, yaitu meningkatkan keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam institusi pertahanan negara. Pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui sosialisasi yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan untuk memperluas akses informasi kepada masyarakat Papua. Namun, kondisi geografis Papua yang luas dan sulit dijangkau masih menjadi kendala dalam pemerataan informasi kepada seluruh calon peserta. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III menunjukkan bahwa aspek komunikasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Kodam XVIII/Kasuari tidak hanya menggunakan jalur komando organisasi, tetapi juga memanfaatkan jaringan sosial masyarakat melalui tokoh adat dan tokoh agama sehingga pesan kebijakan lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal. Pendekatan ini memperkuat pemahaman masyarakat terhadap tujuan program sekaligus membangun kepercayaan antara negara dan masyarakat Papua.

Dari aspek sumber daya, implementasi program memperoleh dukungan personel, anggaran, dan koordinasi lintas lembaga yang cukup memadai. Meskipun demikian, karakteristik geografis Papua menyebabkan biaya operasional dan distribusi informasi menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Dukungan sumber daya yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas kebijakan afirmasi di masa mendatang. Aspek disposisi menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari para pelaksana kebijakan. Hal ini terlihat dari upaya menjangkau peserta dari daerah terpencil, pemberian pendampingan selama proses seleksi, serta pelaksanaan rekrutmen yang transparan dan objektif. Selain itu, implementasi kebijakan juga didukung oleh struktur birokrasi yang jelas melalui pembagian tugas yang terorganisasi antara Mabesad, Kodam, Korem, Kodim, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat.

## **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerimaan Prajurit TNI AD Caba Otsus OAP Jalur Afirmasi**

Faktor pendukung implementasi Kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan penerimaan Prajurit TNI AD Caba Otsus OAP Jalur Afirmasi di Kodam XVIII/Kasuari didukung oleh beberapa faktor utama. Pertama, komitmen pimpinan organisasi yang kuat dalam menjalankan program afirmasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan teritorial dan integrasi nasional. Kedua, struktur birokrasi militer yang jelas dan terorganisasi sehingga memudahkan koordinasi, pengawasan, dan pelaksanaan setiap tahapan rekrutmen. Ketiga, ketersediaan sumber daya, baik personel, anggaran, maupun sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program. Selain itu, dukungan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah turut memperkuat legitimasi kebijakan serta meningkatkan partisipasi generasi muda Orang Asli Papua dalam mengikuti seleksi. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas organisasi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap program afirmasi.

Faktor penghambat implementasi kebijakan. Di sisi lain, implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah kendala. Kondisi geografis Papua yang luas dan sulit dijangkau menjadi hambatan dalam sosialisasi dan pelaksanaan seleksi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur transportasi, komunikasi, pendidikan, dan kesehatan menyebabkan belum meratanya akses informasi dan kesiapan calon peserta. Hambatan lainnya adalah kualitas sumber daya manusia yang beragam, terutama terkait kemampuan akademik, kondisi kesehatan, dan kesiapan mental sebagian peserta afirmatif. Di samping itu, kompleksitas koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam program juga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Meskipun demikian, berbagai hambatan tersebut tidak menghalangi pelaksanaan program, tetapi menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui sinergi antara TNI AD, pemerintah daerah, dan masyarakat guna meningkatkan keberhasilan kebijakan afirmasi secara berkelanjutan.

## **Kontribusi Kebijakan terhadap Stabilitas Keamanan dan Integrasi Nasional**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa program afirmasi tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan rekrutmen personel militer, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat Papua. Kehadiran prajurit yang berasal dari kalangan OAP meningkatkan representasi masyarakat Papua dalam institusi negara dan memperkuat komunikasi sosial antara aparat keamanan dan masyarakat setempat. Kondisi tersebut secara bertahap meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Penelitian juga menemukan bahwa kebijakan afirmasi berkontribusi terhadap penguatan integrasi nasional melalui peningkatan partisipasi OAP dalam struktur formal negara. Keterlibatan OAP sebagai prajurit TNI AD menciptakan integrasi yang lebih substantif karena masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi turut berperan sebagai pelaksana fungsi negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah. Selain itu, program afirmasi berperan sebagai instrumen pembangunan kepercayaan (trust building) antara negara dan masyarakat Papua. Prajurit OAP berfungsi sebagai jembatan sosial dan kultural yang mampu memperkuat hubungan antara institusi pertahanan dan masyarakat lokal. Kedekatan identitas budaya memungkinkan komunikasi yang lebih efektif sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan legitimasi negara di Papua. Dalam perspektif keamanan nasional modern, kebijakan afirmasi memberikan kontribusi melalui peningkatan legitimasi negara, penguatan hubungan sosial antara TNI dan masyarakat, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pertahanan yang berbasis pada pemahaman kondisi sosial dan budaya lokal. Oleh karena itu, program afirmasi dapat dipandang sebagai bentuk pendekatan pertahanan yang mengintegrasikan dimensi keamanan dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung stabilitas keamanan jangka panjang di Papua.

## **Pembahasan**

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penerimaan Prajurit TNI AD Caba Otsus OAP Jalur Afirmasi dipengaruhi oleh sinergi antara komunikasi yang adaptif, dukungan sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang jelas. Temuan ini menguatkan teori implementasi kebijakan Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh empat variabel utama tersebut. Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi kepegawaian, tetapi juga sebagai strategi pertahanan berbasis pendekatan humanistik yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan integrasi nasional. Dengan demikian, kebijakan penerimaan Prajurit TNI AD Caba Otsus OAP Jalur Afirmasi dapat dipahami sebagai instrumen strategis negara dalam membangun stabilitas keamanan yang berkelanjutan melalui peningkatan partisipasi masyarakat Papua dalam sistem pertahanan negara, penguatan kepercayaan terhadap institusi negara, serta pengurangan persepsi marginalisasi yang selama ini menjadi salah satu faktor pemicu konflik di Papua.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerimaan Prajurit TNI AD Calon Bintara Otonomi Khusus Orang Asli Papua (Caba Otsus OAP) Jalur Afirmasi di Kodam XVIII/Kasuari telah berjalan cukup efektif dan didukung oleh aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang memadai. Faktor pendukung utama meliputi komitmen organisasi, dukungan sumber daya, dan penerimaan masyarakat, sedangkan tantangan utama berasal dari kondisi geografis Papua dan kompleksitas koordinasi lintas lembaga. Selain berfungsi sebagai kebijakan rekrutmen personel, program afirmatif ini juga berkontribusi terhadap penguatan integrasi nasional dan stabilitas keamanan melalui peningkatan representasi Orang Asli Papua dalam institusi negara, penguatan hubungan antara masyarakat dan TNI AD, serta pembangunan kepercayaan terhadap negara. Oleh karena itu, keberlanjutan program afirmatif menjadi penting untuk mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan integrasi sosial yang berkelanjutan di Papua.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anderson, J. E. (2006). *Public policy making*. Boston: Houghton Mifflin.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil kemiskinan di Indonesia*.
- Bertrand, J. (2004). *Nationalism and ethnic conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Buzan, B. (1991). *People, states and fear: An agenda for international security studies in the post-Cold War era*. Boulder: Lynne Rienner.
- Chauvel, R., & Bhakti, I. N. (2004). *The Papua conflict: Jakarta's perceptions and policies*. Washington, DC: East-West Center.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Daft, R. L. (2021). *Organization theory and design* (13th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE handbook of qualitative research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. London: Sage Publications.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Gurr, T. R. (2000). *Peoples versus states: Minorities at risk in the new century*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press.
- Human Rights Monitor. (2021). *The armed conflict in West Papua throughout 2021*.
- International Crisis Group. (2012). *Indonesia: The Papua conflict*.
- Kusuma. (2024). *Membara dalam sekam: Menyusuri akar konflik sosial di Maluku tahun 1999*. Madza Media.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Lederach, J. P. (1997). *Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press.
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- McGibbon, R. (2004). *Secessionist challenges in Aceh and Papua*. Washington, DC: East-West Center.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nugroho, R. (2014). *Public policy*. Jakarta: Elex Media.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. New York: PublicAffairs.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation*. Berkeley: University of California Press.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
- Saldaña, J. (2016). *The coding manual for qualitative researchers*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Smith, A. D. (1991). *National identity*. Reno: University of Nevada Press.
- Sugandi, Y. (2008). *Analisis konflik dan rekomendasi kebijakan mengenai Papua*.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryawan, I. N. (2018). *Strategi keamanan negara dalam penanganan konflik Papua*.
- United Nations Development Programme. (1994). *Human development report 1994*.
- Uppsala Conflict Data Program. (2022). *Armed conflict dataset*.
- Weber, M. (1978). *Economy and society*. Berkeley: University of California Press.
- Widjojo, M. S. (2010). *Otonomi khusus Papua dan tantangan integrasi nasional*.
- Widjojo, M. S., et al. (2009). *Papua road map: Negotiating the past, improving the present and securing the future*. Jakarta: LIPI Press.